



**REVISI KEDUA (II)
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016-2021**

**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jenderal Sudirman, Painan Telp. (0756) 7464131, Fax. (0756) 7464085

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

**REVISI KEDUA PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 yang mengamanatkan adanya penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Revisi Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Revisi Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Revisi Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021.
- KETIGA : Dengan berlakunya Revisi kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 ini, maka Revisi Pertama Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal Juli 2019

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN



YOZKI WANDRI, S.Pi. M.Si.
NIP. 19750101 200303 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang ditangani oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2019, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2016-2021 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Pertanian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
2. Renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdahulu.
3. Cascading Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 ini menjadikan arah proses pembangunan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pesisir Selatan lebih terarah

PAINAN, JULI 2019

**KEPALA BAPEDALITBANG
KAB. PESISIR SELATAN**



YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si
NIP. 9750101 200303 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.4
1.4 Sistematika Penulisan	I.4
 BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD	 II.1
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Bapedalitbang	II.1
2.2 Sumberdaya Bapedalitbang	II.3
2.3 Kinerja Pelayanan Bapedalitbang	II.6
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapedalitbang	II.11
 BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	 III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapedalitbang	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.2
3.3 Telaahan Renstra Bappenas/PPN Kemendagri serta Bappeda Prov.	III.7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	III.16
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III.18
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 VI.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapedalitbang	IV.1
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah minimal memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan oleh Daerah baik dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah dan bersifat indikatif. Disamping mempedomani RPJMD penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu kepada Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan /atau urusan Pemerintahan Pilihan Sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bapedalitbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis, yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang serta merupakan komitmen Bapedalitbang. Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapedalitbang dengan mempertimbangkan pencapaian visi Kabupaten

Pesisir Selatan, yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”*** dan misi 1 yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, RPJPD, RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Bapedalitbang adalah melakukan Penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bapedalitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Bapedalitbang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJM dan Penetapan Indikator RPJM yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bapedalitbang sebagai institusi Perencanaan Pembangunan dalam mencapai target RPJMD.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Bapedalitbang

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapedalitbang,
- 2.2. Sumber Daya Bapedalitbang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bapedalitbang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapedalitbang

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bapedalitbang

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapedalitbang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Bappenas/PPN Kemendagri serta Bappeda Provinsi;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.
 - 3.5.1 Strategis Bapedalitbang

BAB IV Tujuan dan Sasaran,

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapedalitbang;

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala, bertugas membantu dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Sekretariat, Sekretariat Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas

membantu Kepala Bapedalitbang di bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Penyusunan Rencana Kegiatan di lingkungan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi.
4. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintah dan Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM, SDA, Lingkungan, Inovasi dan Teknologi.
6. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang dalam melaksanakan Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi serta pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kepala Sub Bidang Analisa Data Base Numerik, Informasi dan Spasial serta Kerjasama Wilayah Perbatasan, Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, Bapedalitbang memiliki sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sarana prasarana (infra struktur) yang menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya.

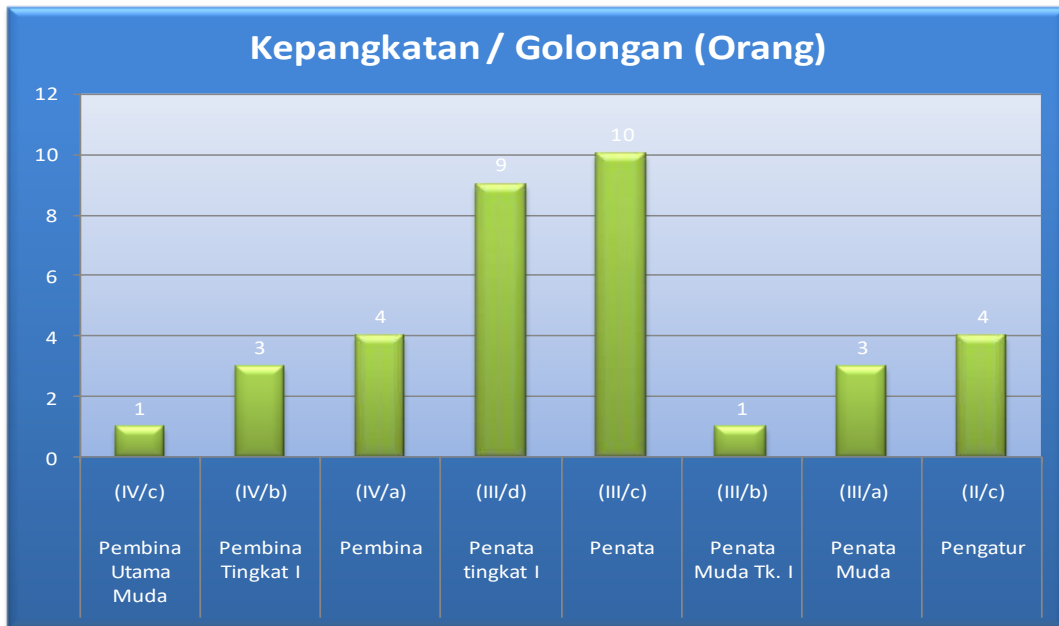
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 35 orang, dengan perincian :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 orang
2. Tenaga Harian Lepas sebanyak 19 orang
3. Kepangkatan/golongan :
 - Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 orang
 - Pembina Tingkat I (IV/b) = 3 orang
 - Pembina (IV/a) = 4 orang
 - Penata Tingkat I (III/d) = 9 orang
 - Penata (III/c) = 10 orang
 - Penata Muda Tingkat I (III/b) = 1 orang
 - Penata Muda (III/a) = 3 orang
 - Pengatur TK. I (II/d) = 4 orang

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan dan golongannya, dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik.2.1. Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

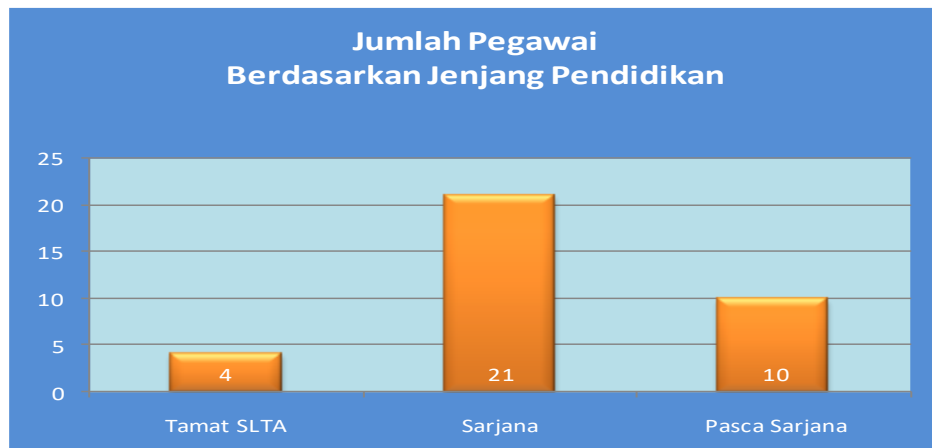


Grafik 2.1 menjelaskan bahwa jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai didominasi oleh golongan dan pangkat III/c (Penata) berjumlah 10 orang atau 28,57 persen dan III/d (Penata Tingkat I) berjumlah 9 orang atau 25,71 persen dari seluruh jumlah pegawai. Jumlah seluruh pegawai yang ada (35 orang) termasuk ke dalam jenjang struktural. Sejalan dengan tugas dan fungsi, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong dan memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

4. Jenjang Pendidikan

- Tamat SLTA= 4 orang
- Sarjana = 21 orang
- Pasca Sarjana = 10 orang

Grafik.2.2. Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik 2.2, klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 10 orang atau proporsinya sebesar 28,57 persen dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 21 orang dengan proporsi 60 persen dari keseluruhan jumlah pegawai, sedangkan untuk klasifikasi SMA/SMK berjumlah 4 orang dengan proporsi 11,43 persen dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas di Bapedalitbang, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Penunjang

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keadaan
1.	Gedung	2	Baik
2.	Ruang Rapat	2	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Bendahara	1	Baik
7.	Meja Kerja	36	Baik
8.	Meja Rapat	2	Baik
9.	Meja Tamu	4	Baik
10.	Kursi Kerja	36	Baik
11.	Kursi Rapat	295	Baik
12.	Sofa Tamu	4	Baik
13.	Mesin Fax	1	Baik
14.	Komputer/PC	12	Baik
15.	Kendaraan bermotor roda empat	3	Baik

16.	Kendaraan bermotor roda dua	10	Baik
17.	GPS	4	Baik
18.	Alat penghancur kertas	4	Baik
19.	UPS	3	Baik
20.	Mesin potong rumput	2	Baik
21.	Genset	1	Baik
22.	Lemari Besi	30	Baik
23.	Filling Kabinet	10	Baik
24.	AC	25	Baik
25.	Lemari piring	2	Baik
26.	Wireless outdoor	2	Baik
27.	Laptop	25	Baik
28.	IPAD	6	Baik
29.	Hard Disk External	6	Baik
30.	Printer	22	Baik
31.	Software/ Aplikasi	1	Baik
32.	Drone	1	Baik
33.	Jalan khusus kantor	1	Baik
34.	Running teks	1	Baik
35.	Instalasi jaringan elektronik	1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kab. Pesisir Selatan

Pencapaian kinerja pelayanan Bapedalitbang dalam melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bapedalitbang dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bapedalitbang dengan realisasi pelaksanaannya.

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa tingkat capaian kinerja Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan tahun 2011-2015 **yang belum tercapai** adalah tersedianya dokumen review dan revisi perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda dan tersedianya dokumen review dan revisi perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda. Sementara capaian kinerja yang lainnya telah tercapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tersedianya perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	Ada	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	-	Ada	85%	85%	87%	89%	91%	93%	83%	88%	93%	96%	98%	97,647	101,15	104,49	105,49	105,38

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Uraian	Anggaran Pada tahun Ke- (Rp.000,-)					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke-(Rp.000,-)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BAPEDALITBANG	4.736.952	5.284.399	6.728.579	7.735.201	9.337.273	4.651.102	4.967.495	5.845.348	7.313.828	8.839.575	1,97	0,88	0,74	0,76	0,78	18,63	16,08
A.	Belanja Tidak Langsung	2.096.763	2.331.636	2.814.812	2.889.618	2.956.132	2.085.365	2.110.218	2.147.570	2.764.490	2.831.784	1,41	0,89	0,75	0,74	0,94		
B.	Belanja Langsung	2.640.189	2.952.763	3.913.766	4.845.583	6.381.142	2.565.737	2.857.277	3.697.778	4.549.338	6.007.791	2,42	0,87	0,73	0,76	0,71		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	445.116	420.446	963.925	640.694	802.355	431.106	527.054	944.100	610.407	750.699	1,80	1,03	0,55	1,47	0,76		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	260.689	461.718	363.769	949.756	1.073.431	258.262	435.109	359.494	929.203	1.055.182	4,12	0,56	1,20	0,38	0,87		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50.000	20.000	42.000	84.000	156.513	24.650	5.500	37.215	65.871	140.654	3,13	1,23	0,13	0,44	0,42		
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	41.480	-	52.500	-	-	28.225	-	49.415	-	-	0,68	-	0,94		
5	Program Pengembangan Data / Informasi	139.913	104.319	385.269	500.363	250.733	139.371	103.939	265.720	494.963	243.240	1,79	1,34	0,27	0,53	1,97		
6	Program Kerjasama Pembangunan	83.355	82.859	-	-	38.239	80.390	79.860	-	-	37.862	0,46	0,97	-	-	0,99		
7	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-	-	187.260	92.574	389.538	-	-	173.918	91.350	346.803	-	-	0,93	1,88	0,23		

8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	920,110	807,568	1,075,496	1,338,854	1,370,665	915,926	752,946	1,059,241	1,181,818	1,300,125	1.49	1.13	0.70	0.79	0.86		
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	102,157	225,635	346,035	402,675	548,192	101,662	199,810	340,851	388,207	525,728	5.37	0.45	0.58	0.85	0.71		
10	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	323,577	347,783	123,763	215,041	251,184	302,777	324,440	115,101	206,884	228,595	0.78	0.87	2.62	0.54	0.82		
11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	183,620	244,066	135,912	418,732	420,744	180,311	228,279	134,640	387,937	389,859	2.29	0.74	1.68	0.32	0.92		
12	Program Perencanaan Tata Ruang	131,652	169,069	248,858	169,866	544,076	131,283	150,940	239,273	161,190	537,531	4.13	0.78	0.61	1.41	0.30		
13	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM Iptek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-	-	33,028	-	-	-	-	31,508	-	-	-	-	0.95	-		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	33,911	-	-	-	-	33,911	-	-	-	-	1.00		
18	Program Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	69,300	-	-	-	-	49,400	-	-	-	-	0.71	-	-	-		
19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	449,061	-	-	-	-	368,188	-	-	-	-	0.82		

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran Bapedalitbang 18,63 persen dan realisasi sebesar 16,08 persen. Penurunan rasio antara realisasi dan anggaran terjadi tahun 2013 yakni 0,87 dari sebelumnya 0,94 persen. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya progress beberapa program diantaranya program administrasi perkantoran, program peningkatan sumber daya aparatur dan program pengembangan data/informasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapedalitbang

2.4.1. Review Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan, baik dalam lingkungan internal Bapedalitbang maupun lingkungan eksternal Bapedalitbang yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Terwujudnya kondisi ke depan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bapedalitbang harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bapedalitbang harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Permendagri 86 Tahun 2017, telah merubah pola Revisi Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016-2021, yaitu perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan

diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan, tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Bapedalitbang, yaitu :

1. Tantangan

- a. Dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif dan perencanaan teknokratik;
- b. Kapasitas dan komitmen SDM perencanaan;
- c. Pemantapan kelembagaan perencanaan di tingkat basis;
- d. Koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan di daerah;
- e. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencana baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencana, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencana;
- f. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
- g. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- h. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
- i. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah;
- j. Peningkatan fasilitas dalam proses perencanaan pembangunan;
- k. Meningkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu;
- l. Peningkatan kemampuan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional yang dapat menjawab tantangan global yang semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat;

- m. Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu. Manajemen kinerja tersebut mencakup : indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) termasuk penerapan “remunerasi”/tunjangan kinerja secara akuntabel;
 - n. Arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran;
 - o. Kuantitas sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan asset;
 - p. Kelengkapan ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi;
 - q. Penataan kelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
 - r. Sosialisasi kepada para pejabat dan staf tentang upaya dan hasil penataan kelembagaan tersebut di atas.
2. Peluang
- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bapedalitbang dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati terhadap Bapedalitbang;
 - c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bapedalitbang;
 - d. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bapedalitbang dalam perencanaan pembangunan;
 - e. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPEDALITBANG

3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi *real* saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan-permasalahan yang ada harus teridentifikasi dengan baik agar isu-isu strategis dapat dirumuskan lebih tepat.

3.1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapedalitbang

Ada beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bapedalitbang :

- a) Rendahnya kualitas SDM perencana
- b) Rendahnya kualitas data perencanaan
- c) Belum terwujudnya perencanaan yang berkualitas
- d) Belum optimalnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- e) Masih rendahnya peran kelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah
- f) Masih rendahnya inovasi yang diterapkan di daerah
- g) Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapedalitbang

Arah Kajian	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Manajemen sumber Daya Aparatur	Masih rendahnya kualitas SDM perencana	<ul style="list-style-type: none">- Penempatan belum sesuai dengan kompetensi- Tingkat pendidikan	Kompetensi perencana PD masih rendah	Rendahnya penguasaan pelaksana kegiatan

		<ul style="list-style-type: none">- Belum tersedianya fungsional perencanaan dan fungsional peneliti		
Manajemen Data	Rendahnya kualitas data perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas SDM pengolah data masih rendah- Belum optimalnya SI Penggunaan Data	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat kevalidan data masih rendah;- Penyampaian laporan PD tidak tepat waktu	Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan pembangunan
Perencanaan Berkualitas	Belum terwujudnya Perencanaan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas SDM perencana masih rendah- Belum optimalnya SI Penggunaan Data- Belum optimalnya peran kelitbangan dalam dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat kevalidan data masih rendah;- Masih kurangnya keterlibatan PD dalam penyusunan dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan- Rendahnya akurasi keputusan pembangunan
Keselaran Perencanaan	Belum optimalnya keselaran dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi internal	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya PD dalam mengacu dokumen perencanaan yang ada	Perencanaan masih kurang tepat sasaran

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Visi tersebut akan diwujudkan pada akhir tahun 2021. Untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sekaligus merupakan visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”**.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Mandiri	berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
Unggul	masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
Agamis	suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
Sejahtera	perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha yang disusun dalam bentuk misi pembangunan tahun 2016-2021 sebagai berikut.

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
- c. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

- e. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Misi 1 Terkait dengan Tupoksi Bapedalitbang), akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat pesisir selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, kepala daerah mengharuskan setiap Satuan Perangkat Daerah bersama-sama melakukan optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah.

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan mengedepankan kualitas dan skala prioritas dalam setiap kegiatan perencanaan.

Tabel 3.2.

Identifikasi Permasalahan Bapedalitbang Berdasarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada	Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi internal bapedalitbang	Kapasitas SDM perencana yang belum merata antar bidang	meningkatkan kompetensi melalui bimtek perencanaan
		Rendahnya kinerja	Koordinasi antar perangkat	Adanya regulasi pendukung

	masyarakat.	koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan	daerah yang perlu ditingkatkan	terhadap proses penyusunan dan penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Belum optimalnya kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan	Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Peluang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah proses penyediaan data dan informasi pembangunan
		Belum Optimalnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	Penguasaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen RPJPD, RPJMD, RTRW masih lemah	Tersedianya beberapa regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelaraskan dokumen perencanaan
		Belum Optimalnya Perencanaan Pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	Kurangnya ketersediaan SDM dan kualitas data	- Terdapat beberapa aparatur yang dapat dijadikan

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

				instruktur - Adanya kebijakan satu data satu peta
		Belum efektifnya pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	Rendahnya penguasaan terhadap aturan dan tahapan pelaksanaan kegiatan	Penerapan analisis risiko pada setiap kegiatan
		Belum Optimalnya Kebijakan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	Belum adanya rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam pembangunan	Sudah dibentuknya Dewan Riset daerah (DRD)

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Tabel 3.3. Identifikasi Permasalahan Kementerian PPN/Bappenas

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Keselarasan Rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L/D	Belum optimalnya kapasitas, kuantitas SDM Perencana	Kurangnya motivasi aparatur untuk meningkatkan kapasitas	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana pusat dan daerah menjadi target nasional
		Belum Optimalnya Koordinasi Internal Antar Bidang	Tingginya Intensitas koordinasi eksternal yang dilakukan Bepedalitbang	Terdapatnya keinginan untuk melakukan koordinasi
		Belum Optimalnya Pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan	1. Belum adanya kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan mengenai data yang akan dipakai dalam proses perencanaan.	Kebutuhan data yang sangat tinggi dan pemangku kepentingan
			2. Manajemen data dan informasi serta pengarsipkan dokumen perencanaan yang masih lemah.	
		Masih lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan	1. Tingginya volume kerja pada Bapedalitbang 2. Masih terdapatnya aparatur yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi perencanaan 3. Penempatan aparatur tidak sesuai dengan kompetensi	Tersedianya berbagai peluang bintek dan pelatihan bagi aparatur
		Belum Optimalnya Koordinasi	1. Kurangnya pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi
2	Rancangan Perpres RKF 2017	-	-	-
3	Terwujudnya rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindak lanjuti K/L	1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Masih rendahnya pemahaman aparatur mengenai pentingnya monev dan pengendalian	1. Tersedianya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan monev pada K/L 2. Tersedianya dana yang cukup monev
		2. Belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, dan evaluasi	1. System pengendalian monitoring dan evaluasi belum komperatif	Tersedianya dana untuk penyaliran sistem penganggaran dan sistem pengendalian monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
			2. Masih terbatasnya SDM yang memahami sistem yang terintegrasi	
4	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/ sub bidang	Tingkat pemaahaman aparatur mengenai tupoksi pribadi dan kelembagaan .	Terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah
		Belum dipedomaninya standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi	Masih adanya pola pikir aparatur yang beranggapan bahwa penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrasi saja	SOP sebagai salah subjek pembinaan dan pengawasan dan aparatur pemeriksaan

Tabel.3.4.				
Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya				
No	Sasaran Jangka Menengah Bapedalitbang	Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	- Masih kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan sasaran dokumen perencanaan daerah	- Rendahnya kapasitas perencana pada setiap OPD - Belum efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan	- Adanya peluang bimbingan teknis peningkatan SDM perencana - Rekomendasi yang ditindaklanjuti
		- Rendahnya kualitas SI perencanaan daerah	- Masih kurangnya sarana prasarana SI Perencanaan - Masih lemahnya SI perencanaan yang ada - Masih minimnya admin dan operator pengelola SI perencanaan - Belum optimalnya mekanisme penyelenggaraan	- Dukungan anggaran terhadap kelengkapan sarana prasarana SI - Penyempurnaan SI perencanaan - Perekrutan admin dan operator Sosialisasi mekanisme

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

			musrenbang	musrenbang sebelum pelaksanaan
		- Rendahnya kualita usulan musrenbang	- Lemahnya pengetahuan stake holder tentang sasaran RPJMD dan Renstra	- peningkatan pemahaman stake holder melalui sosialisasi
2	Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	- Belum tersedianya data yang valid - Rendahnya kualitas data yang dapat dijadikan rujukan peta	- Rendahnya Kapasitas SDM pengelola data - koordinasi pengelola data - Belum optimalnya penggunaan SI dalam pengolahan data	- Tersedianya regulasi yang mewajibkan penggunaan satu data satu peta - Tersedianya Forum Data - Tersedianya program kegiatan terkait dengan peningkatan kualitas data pada setiap OPD
3	Tercapainya sasaran strategis OPD	- Belum optimal pelaksanaan kegiatan dalam tercapainya sasaran OPD	- Belum efektifnya pelaksanaan monitoring kegiatan - Penyampaian laporan kegiatan OPD tidak tepat	- Adanya rekomendai monitoring yang ditindaklanjuti - Tersedianya SI

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

		<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya penguasaan pelaksana terhadap kegiatan 	<p>waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemetaan potensi masalah kegiatan - Belum tepatnya penempatan penugasan pelaksana kegiatan 	<p>Monitoring dan evaluasi dan rapat evaluasi kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan analisa resiko
4	Terwujudnya kebijakan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> -Belum optimalnya rekomendasi kegiatan dalam menjawab kebutuhan pembangunan -Rendahnya peran kelitbangan dalam RKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya peran Dewan Research Daerah - Belum optimalnya efektifitas koordinasi Perencanaan Pembangunan - rendahnya kualitas Musrenbang dan Forum OPD - Rendahnya pengetahuan stake holder tentang sasaran RPJMD dan Renstra 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang kelitbangan - Rekomendasi yang ditindaklanjuti - Sosialisasi Kelitbangan sebelum dilaksanakan Musrenbang - Sosialisasi RPJMD dan Renstra kepada stake holder

3.3.1 Renstra Bappenas / PPN

Dalam Renstra Kementerian Bappenas/ PPN dengan Tupoksi Perencanaan dapat dijelaskan :

1. Sasaran Strategis
 - a. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi, kredibel
 - b. Mewujudkan manajemen tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di kementerian PPN/ Bappenas.
2. Program
 - Program Perencanaan Pembangunan Nasional :
 - a. Menyusun Kebijakan Perencanaan Pembangunan
 - b. Menyiapkan sistem dan regulasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - c. Penyajian informasi hasil pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur perencanaan pusat dan daerah untuk menghasilkan : 1) rencana pembangunan nasional jangka menengah, 2) rencana pembangunan jangka pendek, 3) menyusun kebijakan percepatan pembangunan nasional
 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas kementerian PPN/ Bappenas :
 - a. Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan melalui musrenbang, forum konsultasi publik, dan berbagai focus group Discussion dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
 - b. Melaksanakan pelayanan umum perkantoran
 - c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur bappenas
 - d. Pembiayaan bagi sarana dan prasarna pendukung lembaga kementerian PPN/ Bappenas digunakan untuk memfasilitasi pembangunan gedung kantor, rehabilitasi gedung kantor, peremajaan fasilitasi kerja dan perbaikan utilitas gedung

- Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
Pembiayaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal lembaga Kementrian PPN/ Bappenas.

3.3.2 Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta fasilitasi layanan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM perencana;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
4. Belum dipedomannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
5. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;

7. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
9. Belum optimalnya infrastruktur penunjang kualitas pelayanan LPSE

Tabel.3.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi

Arah Kajian	Permasalahan/ Kondisi Saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Manajemen sumber Daya Aparatur	41,2% Aparatur memiliki kuaifikasi pendidikan menengah dan 58,8 % apartur yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata 1	Pola manajerial yang kurang memperhatikan semakin tingginya tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi yang terjadi	Cepatnya perkembangan arus informasi berpengaruh kepada tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan yang berkualitas tinggi	Koordinasi dan konsolidasi internal bapedalitbang yang perlu ditingkatkan
Sistem dan Tata Kerja Lembaga	Hampir semua sistem dan tata kerja sudah memiliki SOP namun belum sepenuhnya diimplementasikan	Penerapan reward and punishment terhadap peraturan yang menerapkn SOP secara baik dan benar	Adanya kebijakan pemerintah terkait revolusi mental yang dijabarkan dalam RPJMD	Perlunya peningkatan sistem dan tata kerja lembaga yang lebih efktifitas dan efesien
Koordinasi, Komitmen, dan tanggung jawab internal maupun PD	Jumlah koordinasi dan realisasi hasil koordinasi antar PD	Penerapan reward and punishment terhadap PD yang tidak berkoordinasi dengan bapedalitbang dan tidak mengikuti dokumen perencanaan pembangunan	PD yang cendrung tidak mentaati dokumen hasil perencanaan pembangunan	Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingtktan
Pengelolaan data dan informasi perencanaan	Pengelolaan Data dan informasi perencanaan pembangunan belum maksimal sebagai masukan bagi analisis pembangunan dan	Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung untuk mengelola data dan informasi pembangunan	Tuntutan perkembangan zaman memaksa pola pengelolaan data dan informasi mengikuti perkembangan	Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan

	penelitian		teknologi dan informasi	
Pelayanan publik	Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal dalam rangka desiminiasi informasi pembangunan dan keterbukaan informasi publik	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta sumberdaya aparatur yang profesional dan inovasi	Tuntutan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan	Peningkatan kinerja lembaga dalam aspek layanan publik

Sumber : Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016– 2021. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dan, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, adalah : “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”. Perwujudan visi dilakukan melalui misi Gubernur Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tabel. 3.6

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Provinsi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Perlu ditingkatkan Koordinasi dan konsolidasi internal bappeda	Kapasitas SDM Perencanaa dan tingkat pemerataan antar bidang	meningkatkan kompetensi melalui bintek perencanaan
		Perlu ditingkatkan kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan	Koordinasi antar perangkat daerah yang perlu ditingkat	Adanya regulasi pendukung terhadap proses penyusunan dan penerpan dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan	Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Peluang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah proses penyediaan

				data dan informasi pembangunan
--	--	--	--	--------------------------------

Sumber : Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 akan menjadi pedoman dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 tahun ke depan. Tata Ruang tersebut, akan diatur dalam Perda RTRW 2011-2030, antara lain mitigasi bencana yang meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan evakuasi bencana, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan rawan banjir serta pengembangan sistem peringatan dini. Selain itu mengatur struktur ruang dan pola ruang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, sistem dan jaringan utilitas perkotaan, kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan berdasarkan isu pengembangan wilayah dan visi pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu, visi ini juga didasarkan atas azas penyusunan rencana tata ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional. Azas penyusunan penataan ruang yaitu : 1. Keterpaduan; 2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 3. Keberlanjutan; 4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 5. Keterbukaan; 6. Kebersamaan dan Kemitraan; 7. Perlindungan kepentingan umum; 8. Kepastian hukum dan keadilan,serta 9. Akuntabilitas.

Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui : 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2.

Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : “Mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.”

Dalam penyusunan Renstra harus mempertimbangkan penataan ruang wilayah, yang telah mengatur peruntukan fungsi ruang sesuai RTRW dalam mendukung perkembangan wilayah tanpa mengganggu fungsi ruang lainnya.

Tabel. 3.7				
Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan				
No.	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang	Permasalahan	
			Penghambat	Pendorong
1	Implikasi RTRW	Tidak terdapat permasalahan karena dokumen perencanaan sudah sinkron dengan dokumen RTRW	1. RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Belum tersedianya regulasi turunan RTRW	1. Tersedianya Perda RTRW. 2. Bapedalitbang Mengkoordinir percepatan OPD teknis untuk melahirkan regulasi turunan RTRW.
2	Implikasi KLHS	Tidak ada program kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu - isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

3.5.1 Isu Strategis Bapedalitbang

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepannya semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan akan pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumber daya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar – benar efektif dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi capaian kinerja dimasa akan datang.

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan isu strategis Bapedalitbang sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

Dokumen perencanaan yang berkualitas dihasilkan dengan arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang selaras dan searah, sehingga dalam pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan oleh dokumen yang lebih tinggi akan ada upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, baik secara vertikal maupun horizontal.

b. Optimalisasi kualitas data perencanaan

Kualitas data akan sangat menentukan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, karena dengan data yang berkualitas ini, kebijakan pembangunan yang dihasilkan akan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dengan tepat.

c. Peningkatan kualitas SDM Perencana

SDM Perencana yang berkualitas sudah menjadi tuntutan yang sangat tinggi dalam menjawab kompleksitas perencanaan yang dihadapi sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

d. Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan

Keselarasan menjadi tuntutan utama perencanaan kedepan dengan keselarasan antara dokumen efisiensi anggaran dapat dilakukan, karena ada tujuan yang selaras dalam pembangunan. Upaya-upaya instan dalam penyelarasan antar dokumen ini perlu terus dilakukan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BAPEDALITBANG

4.1. Tujuan dan Sasaran Bapedalitbang

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi daerah yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Bapedalitbang menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas “.

4.2.2. Sasaran

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Rangkaian tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Bapedalitbang yang menggambarkan kinerja structural dari OPD Bapedalitbang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	sasaran strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	target kerja sasaran pada tahun ke- (%)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	3	7	8	9	10	11	12
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas		Persentase capaian kinerja utama daerah	80	90	92	93	94	95
		Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra dan Renja	70	80	80	90	90	100
		Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	Persentase perencanaan berbasis spasial	-	-	27,4	30	35	40
		Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	0	75	80	85	90	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	B	B	B	A	A	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapedalitbang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera			
Misi : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatkan kesesuaian tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target program kegiatan antar dokumen perencanaan 2. Optimalisasi kesesuaian perencanaan dan penganggaran 3. Meningkatkan pemahaman PD terhadap sasaran dan kebijakan perencanaan serta kualitas sistem informasi perencanaan daerah 4. Meningkatkan kualitas usulan aspiratif	1. Peningkatan SDM, sarana prasarana dan koordinasi perencanaan 2. Peningkatan kualitas Musrenbang dan pengetahuan stakeholder tentang sasaran RPJMD dan Renstra 3. Peningkatan verifikasi kesesuaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, target program kegiatan antar dokumen perencanaan 4. Peningkatan peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan 5. Peningkatan verifikasi dan validasi usulan program kegiatan dalam sistem perencanaan 6. Peningkatan hasil evaluasi RPJMD
	2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas Data 2. Meningkatkan peta tematik yang berstandar BIG dan meningkatkan kualitas Renja dengan informasi geografis	1. Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, regulasi serta koordinasi pengelola data dan peta 2. Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi yang menyediakan koordinat.

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

	3. Tercapainya sasaran strategis OPD	1. Peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan 2. Peningkatan efektivitas monev kegiatan	1. Peningkatan SDM sarana prasarana 2. Optimalisasi tindak lanjut rekomendasi kegiatan
	4. Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	1. Peningkatan kualitas rekomendasi kegiatan pembangunan 2. Optimalisasi peran kelitbang dalam RKPD	1. Peningkatan Peran Dewan Research daerah dan kerjasama dengan lembaga peneliti. 2. Peningkatan Fasilitas pelaksanaan inovasi daerah dan intensitas penelitian

Dari tabel 5.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan perencanaan Bapedalitbang dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang diemban disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan ke dalam program rencana kerja kegiatan.

Untuk mendukung sasaran, strategi dan kebijakan tersebut dikelompokkan kedalam kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan, didukung oleh Program dan kegiatan :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyusunan Rancangan RKPD
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Penyusunan NOTA kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD
- Penyusunan NOTA kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD
- Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah
- Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Fasilitasi dan Sinkronisasi RPJM Nagari

Program Perencanaan pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar

- Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman (PPSP)
- Koordinasi program PAMSIMAS

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
- Koordinasi Program IPDMI
- Koordinasi Perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup

2. Sasaran mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkualitas, ditunjang oleh Program dan kegiatan :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi spasial kerjasama wilayah dan perbatasan,
- Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan

Program Kerjasama Pembangunan

- Koordinasi Spasial, Kerjasama Wilayah dan Perbatasan

3. Sasaran Terwujudnya Kebijakan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, didukung oleh program dan kegiatan :

Program peningkatan kelembagaan dan sumber daya kelitbangan

- Penguatan kerjasama kelitbangan

Program Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatan SDM & IPTEK Daerah

- Koordinasi Kelitbangan
- Kebijakan Pusat dan Daerah

Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

- Perumusan dan Penajaman Sistem Inovasi Daerah

4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang, didukung oleh Program dan kegiatan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis Bapedalitbang Tahun 2016 – 2021 memperhitungkan sumber – sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Bapedalitbang Kab.Pesisir Selatan. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana Dekonsentrasi dari Pemerintahan Pusat.

Penyajian indikatif rencana strategis pembangunan bapedalitbang kabupaten pesisir selatan 2016-2021 berpedoman pada pembiayaan pagu indikatif RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada lampiran table V1.1.

TABEL 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
							Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)			
-1	2	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	1. Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan			Persentase capaian kinerja Utama Daerah		80		90		92		93		94		95		95		Bapedalitbang		
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	7 dokumen	9 dokumen	820,000	9 dokumen	960,000	9 dokumen	1,330,000	9 dokumen	1,000,000	9 dokumen	1,020,000	9 dokumen	940,000	9 dokumen	840,000	Bapedalitbang	Pessel	
			09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	terlaksananya musrenbang RKPD	100	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	Bapedalitbang	Pessel	
			08	Penyusunan Rancangan RKPD	tersusunya dokumen RKPD	-	1	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
			26	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	terkelolanya e-planning	0	1	100,000	1	250,000	1	250,000	1										
			23	Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah	Terhimpunnya berbagai informasi tentang perencanaan dan penganggaran daerah	-	-	-	-	-	100	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	-	Bapedalitbang	Pessel	
			17	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD	tersusunya dokumen KUA dan PPAS RAPBD	2	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	Bapedalitbang	Pessel	
			16	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD	tersusunya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	2	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	Bapedalitbang	Pessel	
			19	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Terlaksananya buku Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Bupati	95%	75	150,000	80	160,000	85	170,000	90	180,000	90	190,000	90	200,000	90	200,000	Bapedalitbang	Pessel	
			13	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah		-	100	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
			29	evaluasi RKPD	Tersedianya Laporan evaluasi pelaksanaan RKPD	-	-	-	1	60,000	1	70,000	1	80,000	1	90,000	1	150,000	1	150,000	Bapedalitbang	Pessel	
			31	Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari	Terlaksananya Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari dan RPJM Kabupaten	0%	0	-	0	-	182 nagari	250,000	104.00	150,000	36	150,000	0	-	0	-	Bapedalitbang		
					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	80%	85%	280,000	90%	290,000	95%	301,000	95%	318,100	95%	336,410	95%	356,051	95%	256,051	Bapedalitbang	
			11	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terwujudnya akselerasi stake holder pembangunan di kawasan pedesaan	80%	80%	80,000	80%	80,000	90%	80,000	90%	85,000	90%	90,000	95%	95,000	95%	95,000	Bapedalitbang		
			09	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Meningkatnya kinerja koordinasi dan terintegrasinya program-program penanggulangan	80%	85%	100,000	90%	110,000	95%	121,000	95%	133,100	95%	146,410	95%	161,051	95%	161,051	Bapedalitbang		
		04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	100%	100,000	-	-	Bapedalitbang			
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang terkoordinasikan	80%	85%	150,000	90%	165,000	95%	181,500	95%	199,650	95%	219,615	95%	241,576.50	95%	241,576.50	Bapedalitbang	Pessel	
		03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	80%	85%	150,000	90%	165,000	95%	181,500	95%	199,650	95%	219,615	95%	241,576.50	95%	241,576.50	Bapedalitbang	Pessel		

[illegible]

TABEL VI.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Perangkat Daerah Bapedalitbang

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGR						
							2016		2017		2018		2
							Target kinerja	Target Rp. (jt)	Target kinerja	Target Rp. (jt)	Target kinerja	Target Rp. (jt)	Target kinerja
-1	2	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM perencana yang berkompentensi	10	10	75,000	10	75,000	10	75,000	10
			01.	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya peningkatan SDM aparatur bappeda	10	15	75,000	15	75,000	15	75,000	15
			06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	70%	70%	194,500	80%	204,500	80%	214,500	80%
			01.	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	70	70	194,500	75	204,500	75	214,500	75
			15.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat integrasi data pembangunan	85%	85%	290,000	90%	250,000	90%	250,000	95%
			07.	1. Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi updating data sektoral daerah	1 laporan	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan
			12.	2. penyedia data statistik	Tersedianya data statistik untuk data base perencanaan	-	1 lap	40,000	-	-	-	-	-
			11.	3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan	tersosialisasinya program-program pembangunan	75%	80%	50,000	85%	50,000	90%	50,000	95%
			09.	4. Penyusunan Profil Daerah	tersusunya profil daerah	1 dokumen	100%	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen
			26.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase dokumen Tata Ruang yang ditindaklanjuti	80%	80%	185,000	80%	750,000	80%	325,000	90%
			21	1. Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya evaluasi RTRW	0	1	35,000	0	-	0	-	0
			04.	2. Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010 – 2030	tersusunya revisi dokumen RTRW	0	0	-	1	450,000	0	-	0
			24	3. Pengubahan Perubahan peraturan daerah tentang revisi RTRW Kab. Pesisir Selatan	Tersusunya Dokumen peraturan daerah tentang revisi RTRW Kab. Pesisir	0	0	-	0	-	1	175,000	0
			39.	4. Penyusunan Kajian KLHS Revisi RTRW	tersedianya dokumen KLHS RTRW	0	0	-	1	150,000	0	-	0
			1	5. Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Terkoordinasikannya pengendalian pemanfaatan ruang	100%	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi pendukung perencanaan pembangunan	1 aplikasi	1 aplikasi	100,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi
				1. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	terkelolanya e-planning	0	1	100,000	1	250,000	1	250,000	1
			24.	Program Perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	80%	85%	220,000	90%	100,000	95%	-	95%
			13.	1. Penyusunan Database Prasarana Wilayah dan SDA Berbasis Informasi Geografis (GIS)	Tersedianya database prasarana wilayah berbasis GIS	0%	1	220,000	1	100,000	1	-	1
			22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	80%	85%	80,000	90%	-	95%	-	95%
			24.	Penyusunan Profil Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	tersusunya buku profil pasar	1	1	80,000	1	-	1	-	1
			16.	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	80%	85%	-	85	250,000	85	360,000	85
				Penyusunan Masterplan Pendidikan	Tersedia Dokumen Masterplan / perub	0%	0	-	0	-	1 master plane	300,000	0
				Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Permukiman	Terkoordinirnya Program Urusan	90%	90%	-	90%	-	90%	60,000	90%
				Penyusunan materplan Pendidikan	tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan	0%	0	-	1	250,000	1	-	1

		Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM perencana yang berkompetensi (orang)	50	50	150,000	50	150,000	50	150,000	50
			34	1 Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatu perencana lingkup pemda kab pessel	50	50	150,000	50	150,000	50	150,000	50
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	7 dokumen	9 dokumen	1,455,000	9 dokumen	1,095,000	9 dokumen	1,615,000	9 dokumen
			20.	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2021	Tersusunnya RPJMD kab Pessel 2016-2021	0	1	350,000	-	100,000	1	100,000	1
			37.	Sosialisasi RPJMD	tersosialisasikannya RPJMD Kab. Pessel	0	0	80,000	1	-	-	-	-
			09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	terlaksananya musrenbang RKPD	100	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100
			34.	Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Renstra Bappeda 2016-2021	-	1	70,000	-	-	-	-	-
				Pengesahan perubahan perda RPJM Pessel	Tersusunnya Perda Revisi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021	-	-	-	-	-	100	150,000	-
				Koordinasi penyusunan penganggaran daerah	Terhimpunnya berbagai informasi tentang perencanaan dan penganggaran daerah	-	-	-	-	-	100	100,000	0
			08.	Penyusunan Rancangan RKPD	tersusunnya dokumen RKPD	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1
			15.	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS RAPBD	2	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2
			17.	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	2	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2
			34.	Penyusunan rancangan rencana strategis SKPD	Tersusunnya Rancangan Renstra SKPD	-	100	20,000	-	-	-	-	-
			33.	Penilaian unit kerja penyusunan dokumen berprestasi	Terlaksananya penilaian dokumen SKPD	-	100	10,000	-	-	-	-	-
			42.	evaluasi RKPD	Tersedianya Laporan evaluasi pelaksanaan RKPD	-	-	-	1	60,000	1	70,000	1
			12.	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertangjawaban (LKPI)	Tersusunnya laporan LKPJ kepada daerah	1	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1
			14.	Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Tersusunnya perjanjian Kinerja	1	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1
			47	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Terlaksananya buku Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Bupati	95%	75	150,000	80	160,000	85	170,000	90
			41.	Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari dengan RPJM Kabupaten	Terlaksananya Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari dan RPJM Kabupaten	0%	0	-	0	-	182 nagari	250,000	104.00
				Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	-	1 kerjasama	150,000	-	-	-	-	-
			32.	Penyusunan Kajian KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RPJMD	-	1	150,000	-	-	-	-	-

			22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	80%	85%	280,000	90%	290,000	95%	301,000	95%
			16	1 Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Terwujudnya akselerasi stake holder pembangunan di kawasan pedesaan	80%	80%	80,000	80%	80,000	90%	80,000	90%
				2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Meningkatnya kinerja koordinasi dan terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan di Kab.	80%	85%	100,000	90%	110,000	95%	121,000	95%
				3 Koordinasi perencanaan bidang ekonomi	Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang terkoordinasikan	80%	85%	200,000	90%	420,000	95%	242,000	95%
				1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	80%	85%	150,000	90%	165,000	95%	181,500	95%
				2 Koordinasi Aksi PPK	terlaksananya koordinasi aksi pencegahan korupsi	80%	85%	50,000	90%	55,000	95%	60,500	95%
				4 Penyusunan RAD Implementasi ABS-SBK	tersusunya rencana aksi daerah implementasi ABS-SBK	0%	0	-	0	-	0	-	1
				5 Koordinasi Kabupaten sehat		-	-	-	-	-	-	-	100
				6 Penyusunan database pendidikan berbasis GIS		-	-	-	100	200,000	-	-	-
				7 Koordinasi kabupaten sehat 2019		-	-	-	-	-	-	-	100
2.	Tercapainya Target Pembangunan Daerah	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	160,000	1 Dokumen	160,000	1 Dokumen	160,000	1 Dokumen
				1 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	1	1	160,000	1	160,000	1	160,000	1
				Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	485,000	5 kerjasama
				1 Masterplan Pengelolaan SDA dan LH	Tersedianya Buku Masterplan Pengelolaan SDA dan LH	0%	0	-	0	-	1	300,000	0
				2 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Pihak Ketiga	terkoordinasikannya kerjasama pembangunan dengan pihak ketiga	5 kerjasama	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama
				3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pangan, SDA, dan LH	Terkoordinirnya Program Urusan	90%	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	90%
				4 Koordinasi pembangunan antar daerah		80%	80%	-	-	-	-	-	-
				Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	80%	85%	565,000	90%	321,500	95%	241,500	95%

				24.	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah	80%	85%	165,000	90%	181,500	95%	181,500	95%
				12.	2	Koordinasi Loan WISM	terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program WISMIP	80%	85%	200,000	90%	70,000	95%	-	95%
					3	Koordinasi IPDMIP	Terlaksananya rapat koordinasi mengenai sanitasi permukiman	90%	-	-	-	75%	60,000	80%	
				04.	4	Penunjang WISM	Optimalnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program WISMIP	80%	85%	200,000	90	70,000	95%	95%	
				19.		Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah	Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan	40%	50%	255,000	60%	475,000	70%	255,000	80%
				13.	1	Koordinasi Program PAMSIMAS	terkoordinasikannya program PMSIMAS	40%	50 persen	180,000	60 persen	180,000	70 persen	180,000	80 persen
					2	Koordinasi Program AMPL dan PPSP	terkoordinasikanya program AMPL dan PPSP	40%	50 persen	75,000	60 persen	75,000	70 persen	75,000	80 persen
					3	Replikasi pengelolaan data AMPL		-	-	-	100	220,000	-	-	-
				22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	-	85%	150,000	90%	-	95%	-	95%
				21.	1	Penyusunan Kajian Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Pangan	tersedianya kajian tentang pengembangan pangan daerah	-	1	90,000	1	-	1	-	1
				20.	2	Pengesahan RANPERDA BUMD	Tersedianya Perda BUMD	-	100	60,000	-	-	-	-	-
				02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	80%	80%	443,687	80%	505,687	80%	1,863,687	80%
				22.	1	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	75	75	96,611	80	106,611	80	116,611	80
				24.	2	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	75	75	177,076	80	187,076	80	197,076	80
				07.	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	75	75	130,000	80	140,000	80	150,000	80
					4	Pembangunan Gedung Arsip dan Rumah Jaga	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	10	10	20,000	80	-	80	1,000,000	80
					5	Penataan Gedung kantor dan Lingkungan Bapedalitbang	Terwujudnya kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur	10	10	20,000	80	-	80	400,000	80
					7	pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas operasional	-	-	-	3 unit	72,000	-	-	5 unit
				01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran yang terlayani	90%	90%	85,000	90%	135,000	90%	140,000	90%
				18.	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%)	90%	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%
				22.	2	Penunjang operasional perencanaan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	-	-	-	8 dok	50,000	8 dok	55,000	8 dok

				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan kinerja aparatur	-	-	-	-	-	-	-	85%
				1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Meningkatnya kinerja aparatur Bapedalitbang	-	-	-	-	-	-	-	100
		Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan		Program Penelitian dan Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah		-	-	-	-	-	80%	90,000	90%
				Koordinasi Kelitbangan	Meningkatnya kerjasama dengan lembaga penelitian/ perguruan tinggi	-	-	-	-	-	80%	90,000	90%
			27.	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah		-	-	-	-	192,977		755,000	
				1 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan pemda	90%	0	-	0	0	80%	70,000	90%
				2 Sinkronisasi Pelaksanaan Inovasi Sistem Informasi daerah	Persentase inovasi yang diterapkan dalam sistem informasi daerah	0	0	-	0	0	80%	70,000	90%
				3 Peningkatan Kapasitas SDM Kelitbangan	Persentase SDM kelitbangan yang meningkat	0	0	-	0	0	80%	50,000	90%
			09.	4 Pengkajian Pemanfaatan Dana Desa	Persentase dana desa yang tepat sasaran	-	0	-	0	0	65%	65,000	75%
				5 Pelaksanaan Pengkajian Peraturan perundang-Undangan	Adanya Pengkajian Peraturan perundang-Undangan	0	0	-	0	0	1 kajian	200,000	1 kajian
			11.	6 Penguatan Kerja sama Kelitbangan	Adanya Penguatan Kerja sama Kelitbangan	0	0	-	0	0	1 kerjasama	200,000	1 kerjasama
			03.	8 Pengembangan inovasi pada generasi muda	Terciptanya inovasi pada generasi muda	0	0	-	3 Inovasi	92,976.60	3 inovasi	100,000	3 inovasi
			04.	9 Forum inovasi daerah		-	-	-	100	100,000	-	-	-
			28.	Prog Penelitian & Pembangunan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah		-	-	-	-	-	-	400,000.00	-
			09.	1 Pengkajian pemanfaatan dana desa	Tersusunnya dokumen kajian pemanfaatan dana desa	-	-	-	-	-	100	60,000	100
			12.	2 Penataan Kawasan pariwisata Berbasis Daur Ulang	Terwujudnya Penataan kawasan wisata berbasis daur ulang	-	-	-	-	-	100	150,000	100
			04.	3 kajian strategis pembukaan jalan kambang Muaro - labuah		-	-	-	-	-	100	190,000	-

TABEL T-C.28
Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Perangkat Daerah Bapedalitbang

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
							Target kinerja	Target Rp. (jt)	Target kinerja	Target Rp. (jt)	Target kinerja	Target Rp. (jt)	Target kinerja	Target Rp. (jt)	Target kinerja	Target Rp. (jt)	Target kinerja	Target Rp. (jt)	Target kinerja	Target Rp. (jt)				
-1	2	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26		
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM perencana yang berkompentensi	10	10	75,000	10	75,000	10	75,000	10	75,000	10	75,000	50	75,000	50	75,000	Bapedalitbang	Pessel		
			01.	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksanya peningkatan SDM aparatur bappeda	10	15	75,000	15	75,000	15	75,000	15	75,000	15	75,000	15	75,000	15	75,000	Bapedalitbang	Pessel		
			06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	70%	70%	194,500	80%	204,500	80%	214,500	80%	219,500	90%	224,500	90%	229,500	90%	229,500	Bapedalitbang	Pessel		
			01.	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	70	70	194,500	75	204,500	75	214,500	75	219,500	90	224,500	90	229,500	90	229,500	Bapedalitbang	Pessel		
			15.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat Integrasi data pembangunan	85%	85%	290,000	90%	250,000	90%	250,000	95%	250,000	95%	250,000	95%	250,000	95%	250,000	Bapedalitbang	Pessel		
			07.	1 Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi updating data sektoral daerah	1 laporan	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	Bapedalitbang	Pessel		
			12.	2 penyedia data statistik	Tersedianya data statistik untuk data base perencanaan	-	1 lap	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel			
			11.	3 Penyebarluasan Informasi Pembangunan	tersosialisakanya program-program pembangunan	75%	80%	50,000	85%	50,000	90%	50,000	95%	50,000	95%	50,000	95%	50,000	95%	50,000	Bapedalitbang	Pessel		
			09.	4 Penyusunan Profil Daerah	tersusunya profil daerah	1 dokumen	100%	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	Bapedalitbang	Pessel		
			26.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase dokumen Tata Ruang yang ditindaklanjuti	80%	80%	185,000	80%	750,000	80%	325,000	90%	150,000	90%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	Bapedalitbang	Pessel		
			21	1 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya evaluasi RTRW	0	1	35,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bapedalitbang	Pessel		
			04.	2 Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010 – 2030	tersusunnya revisi dokumen RTRW	0	0	-	1	450,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bapedalitbang	Pessel		
			24	3 Pengesahan Perubahan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan	Tersusunnya Dokumen peraturan daerah tentang revisi RTRW Kab. Pesisir Selatan	0	0	-	0	-	1	175,000	0	-	0	-	0	-	0	-	Bapedalitbang	Pessel		
			39.	4 Penyusunan Kajian KLHS RTRW	Tersedianya dokumen KLHS RTRW	0	0	-	1	150,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bapedalitbang	Pessel		
			1	5 Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Terkoordinasikannya pengendalian pemanfaatan ruang	100%	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	Bapedalitbang	Pessel		
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi pendukung perencanaan pembangunan	1 aplikasi	1 aplikasi	100,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	Bapedalitbang	Pessel		
				1 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	terkelolanya e-planning	0	1	100,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	Bapedalitbang	Pessel		
			24.	Program Perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	80%	85%	220,000	90%	100,000	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	Bapedalitbang	Pessel		
			13.	1 Penyusunan Database Prasarana Wilayah dan SDA Berbasis Informasi Geografis (GIS)	Tersedianya database prasarana wilayah berbasis GIS	0%	1	220,000	1	100,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Bapedalitbang	Pessel		
			22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	80%	85%	80,000	90%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	Bapedalitbang	Pessel		
			24.	Penyusunan Profil Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	tersusunya buku profil pasar	1	1	80,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Bapedalitbang	Pessel		
			16.	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	80%	85%	-	85	250,000	85	360,000	85	60,000	90	60,000	90	60,000	90	60,000	Bapedalitbang	Pessel		
				Penyusunan Masterplan Pendidikan	Tersedia Dokumen Masterplan / perubub	0%	0	-	0	-	1 master plane	300,000	0	-	0	-	0	-	0	-	Bapedalitbang	Pessel		
				Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Permukiman	Terkoordinirnya Program Urusan	90%	90%	-	90%	-	90%	60,000	90%	60,000	90%	60,000	90%	60,000	90%	60,000	Bapedalitbang	Pessel		
				Penyusunan materplan Pendidikan	tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan	0%	0	-	1	250,000	1	-	1	-	1	-	1	0	1	0	Bapedalitbang	Pessel		

		Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM perencana yang berkompetensi (orang)	50	50	150,000	50	150,000	50	150,000	50	150,000	50	150,000	50	150,000	Bapedalitbang	Pessel		
			34	1 Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatu perencana lingkup pmda kab pessel	50	50	150,000	50	150,000	50	150,000	50	150,000	50	150,000	50	150,000	Bapedalitbang	Pessel		
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	7 dokumen	9 dokumen	1,455,000	9 dokumen	1,095,000	9 dokumen	1,615,000	9 dokumen	1,385,000	9 dokumen	1,405,000	9 dokumen	1,325,000	9 dokumen	1,225,000	Bapedalitbang	Pessel
			20.	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2021	Tersusunnya RPJMD kab Pessel 2016-2021	0	1	350,000	-	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	Bapedalitbang	Pessel
			37.	Sosialisasi RPJMD	tersosialisasikannya RPJMD Kab. Pessel	0	0	80,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
			09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	terlaksananya musrenbang RKPD	100	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	Bapedalitbang	Pessel
			34.	Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Renstra Bappeda 2016-2021	-	1	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
				Pengesahan perubahan perda RPJM Pessel	Tersusunnya Perda Revisi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021	-	-	-	-	-	100	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
				Koordinasi penyusunan penganggaran daerah	Terhimpunnya berbagai informasi tentang perencanaan dan penganggaran daerah	-	-	-	-	-	100	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	-	Bapedalitbang	Pessel
			08.	Penyusunan Rancangan RKPD	tersusunnya dokumen RKPD	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	Bapedalitbang	Pessel
			15.	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS RAPBD	2	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	Bapedalitbang	Pessel
			17.	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	2	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	Bapedalitbang	Pessel
		34.	Penyusuna rancangan rencana strategis SKPD	Tersusunnya Rancangan Renstra SKPD	-	100	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
		33.	Penilaian unit kerja penyusunan dokumen berprestasi	Terlaksananya penilaian dokumen SKPD	-	100	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
		42.	evaluasi RKPD	Tersedianya Laporan evaluasi pelaksanaan RKPD	-	-	-	1	60,000	1	70,000	1	80,000	1	90,000	1	150,000	1	150,000	Bapedalitbang	Pessel	
		12.	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertangjawaban (LKPI)	Tersusunnya laporan LKPI kepala daerah	1	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1	110,000	Bapedalitbang	Pessel	
		14.	Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Tersusunnya perjanjian Kinerja	1	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	Bapedalitbang	Pessel	
		47	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Terlaksananya buku Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Bupati	95%	75	150,000	80	160,000	85	170,000	90	180,000	90	190,000	90	200,000	90	200,000	Bapedalitbang		
		41.	Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari dengan RPJM Kabupaten	Terlaksananya Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari dan RPJM Kabupaten	0%	0	-	0	-	182 nagari	250,000	104.00	150,000	36	150,000	0	-	0	-	Bapedalitbang		
			Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	-	1 kerjasama	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
		32.	Penyusunan Kajian KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RPJMD	-	1	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel	

			22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	80%	85%	280,000	90%	290,000	95%	301,000	95%	318,100	95%	336,410	95%	356,051	95%	256,051	Bapedalitbang	
			16	1 Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Terwujudnya akselerasi stake holder pembangunan di kawasan pedesaan	80%	80%	80,000	80%	80,000	90%	80,000	90%	85,000	90%	90,000	95%	95,000	95%	95,000	Bapedalitbang	
				2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Meningkatnya kinerja koordinasi dan terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan di Kab.	80%	85%	100,000	90%	110,000	95%	121,000	95%	133,100	95%	146,410	95%	161,051	95%	161,051	Bapedalitbang	
				3 Koordinasi perencanaan bidang ekonomi	Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	100%	100,000	-	-	Bapedalitbang	
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang terkoordinasikan	80%	85%	200,000	90%	420,000	95%	242,000	95%	666,200	95%	442,820	95%	472,102.00	95%	322,102.00	Bapedalitbang	Pessel
				1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	80%	85%	150,000	90%	165,000	95%	181,500	95%	199,650	95%	219,615	95%	241,576.50	95%	241,576.50	Bapedalitbang	Pessel
				2 Koordinasi Aksi PPK	terlaksananya koordinasi aksi pencegahan korupsi	80%	85%	50,000	90%	55,000	95%	60,500	95%	66,550	95%	73,205	95%	80,525.50	95%	80,525.50	Bapedalitbang	Pessel
				4 Penyusunan RAD Implementasi ABS-SBK	tersusunya rencana aksi daerah implementasi ABS-SBK	0%	0	-	0	-	0	-	1	250,000	1	-	1	0	1	0	Bapedalitbang	Pessel
				5 Koordinasi Kabupaten sehat		-	-	-	-	-	-	100	50,000	100	50,000	100	50,000	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
				6 Penyusunan database pendidikan berbasis GIS		-	-	-	100	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
				7 Koordinasi kabupaten sehat 2019		-	-	-	-	-	-	100	100,000	100	100,000	100	100,000	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
2.	Tercapainya Target Pembangunan Daerah	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	160,000	1 Dokumen	160,000	1 Dokumen	160,000	1 Dokumen	160,000	1 Dokumen	160,000	1 Dokumen	160,000	1 Dokumen	160,000	Bapedalitbang	Pessel
				1 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	1	1	160,000	1	160,000	1	160,000	1	160,000	1	160,000	1	160,000	1	160,000	Bapedalitbang	Pessel
				Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	485,000	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	385,000	5 kerjasama	185,000	Bapedalitbang	Pessel
				1 Masterplan Pengelolaan SDA dan LH	Tersedianya Buku Masterplan Pengelolaan SDA dan LH	0%	0	-	0	-	1	300,000	0	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
				2 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Pihak Ketiga	terkoordinasikannya kerjasama pembangunan dengan pihak ketiga	5 kerjasama	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	Bapedalitbang	Pessel
				3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pangan, SDA, dan LH	Terkoordinirnya Program Urusan	90%	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	Bapedalitbang	Pessel
				4 Koordinasi pembangunan antar daerah		80%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	200,000	-	-	Bapedalitbang	Pessel
				Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	80%	85%	565,000	90%	321,500	95%	241,500	95%	246,500	95%	881,500	95%	256,500	95%	256,500	Bapedalitbang	Pessel

			24.	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Terlaksanya koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah	80%	85%	165,000	90%	181,500	95%	181,500	95%	181,500	95%	181,500	95%	181,500	Bapedalitbang	Pessel				
				12.	2	Koordinasi Loan WISM	terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program WISMP	80%	85%	200,000	90%	70,000	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	Bapedalitbang	Pessel			
					3	Koordinasi IPDMIP	Terlaksananya rapat koordinasi mengenai sanitasi permukiman	90%	-	-	-	75%	60,000	80%	65,000	85%	700,000	90%	75,000	90%	75,000	Bapedalitbang	Pessel		
					4	Penunjang WISM	Optimalnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program WISMP	80%	85%	200,000	90	70,000	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	Bapedalitbang	Pessel		
				19.	Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah		Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan	40%	50%	255,000	60%	475,000	70%	255,000	80%	255,000	90%	255,000	100%	255,000	100%	255,000	Bapedalitbang	Pessel	
					13.	1	Koordinasi Program PAMSIMAS	terkoordinasikannya program PMSIMAS	40%	50 persen	180,000	60 persen	180,000	70 persen	180,000	80 persen	180,000	90 persen	180,000	100 persen	180,000	100 persen	180,000	Bapedalitbang	Pessel
						2	Koordinasi Program AMPL dan PPSP	terkoordinasikanya program AMPL dan PPSP	40%	50 persen	75,000	60 persen	75,000	70 persen	75,000	80 persen	75,000	90 persen	75,000	100 persen	75,000	100 persen	75,000	Bapedalitbang	Pessel
				3		Replikasi pengelolaan data AMPL		-	-	-	100	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
				22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	-	85%	150,000	90%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	Bapedalitbang	Pessel	
			21.	1	Penyusunan Kajian Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Pangan	tersedianya kajian tentang pengembangan pangan daerah	-	1	90,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Bapedalitbang	Pessel	
				20.	2	Pencegahan RANPERDA BUMD	Tersedianya Perda BUMD	-	100	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
				02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	80%	80%	443,687	80%	505,687	80%	1,863,687	80%	628,687	90%	493,687	90%	658,687	90%	508,687	Bapedalitbang	Pessel		
			22.	1	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	75	75	96,611	80	106,611	80	116,611	80	121,611	90	126,611	90	131,611	90	131,611	Bapedalitbang	Pessel		
				24.	2	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	75	75	177,076	80	187,076	80	197,076	80	202,076	90	207,076	90	212,076	90	212,076	Bapedalitbang	Pessel	
			07.	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	75	75	130,000	80	140,000	80	150,000	80	155,000	90	160,000	90	165,000	90	165,000	Bapedalitbang	Pessel		
				4	Pembangunan Gedung Arsip dan Rumah Jaga	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	10	10	20,000	80	-	80	1,000,000	80	-	95	-	95	-	95	-	95	Bapedalitbang	Pessel	
				5	Penataan Gedung kantor dan Lingkungan Bapedalitbang	Terwujudnya kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur	10	10	20,000	80	-	80	400,000	80	-	95	-	95	-	95	-	95	Bapedalitbang	Pessel	
				7	pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas operasional	-	-	-	3 unit	72,000	-	-	5 unit	150,000	-	-	5 unit	150,000	-	-	Bapedalitbang	Pessel		
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran yang terlayani	90%	90%	85,000	90%	135,000	90%	140,000	90%	145,000	90%	150,000	90%	155,000	90%	155,000	Bapedalitbang	Pessel			
			18.	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%)	90%	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	Bapedalitbang	Pessel		
			22.	2	Penunjang operasional perencanaan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	-	-	-	8 dok	50,000	8 dok	55,000	8 dok	60,000	8 dok	65,000	8 dok	70,000	8 dok	70,000	Bapedalitbang	Pessel		

				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan kinerja aparatur	-	-	-	-	-	-	85%	150,000.00	-	-	85%	150,000.00	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
				1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Meningkatnya kinerja aparatur Bapedalitbang	-	-	-	-	-	-	100	150,000	-	-	100	150,000	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
		Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan		Program Penelitian dan Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah		-	-	-	-	-	80%	90,000	90%	100,000	95%	150,000	95%	175,000	100%	175,000	Bapedalitbang	Pessel
				Koordinasi Kelitbangan	Meningkatnya kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi	-	-	-	-	-	80%	90,000	90%	100,000	95%	150,000	95%	175,000	100%	175,000	Bapedalitbang	Pessel
			27.	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah		-	-	-		192,977		755,000		815,000		860,000		915,000		815,000	Bapedalitbang	Pessel
				1 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan pemda Daerah	90%	0	-	0	0	80%	70,000	90%	85,000	95%	100,000	1	120,000	1	120,000	Bapedalitbang	Pessel
				2 Sinkronisasi Pelaksanaan Inovasi Sistem Informasi daerah	Persentase inovasi yang diterapkan dalam sistem informasi daerah	0	0	-	0	0	80%	70,000	90%	80,000	95%	95,000	1	100,000	1	100,000	Bapedalitbang	Pessel
				3 Peningkatan Kapasitas SDM Kelitbangan	Persentase SDM kelitbangan yang meningkat	0	0	-	0	0	80%	50,000	90%	75,000	90%	85,000	90%	100,000	100%	100,000	Bapedalitbang	Pessel
			09.	Pengkajian Pemanfatan Dana Desa	Persentase dana desa yang tepat sasaran	-	0	-	0	0	65%	65,000	75%	75,000	80%	80,000	90%	95,000	90%	95,000	Bapedalitbang	Pessel
				5 Pelaksanaan Pengkajian Peraturan perundang-Undangan	Adanya Pengkajian Peraturan perundang-Undangan	0	0	-	0	0	1 kajian	200,000	1 kajian	200,000	1 kajian	200,000	1 kajian	200,000	1 kajian	200,000	Bapedalitbang	Pessel
			11.	6 Penguatan Kerja sama Kelitbangan	Adanya Penguatan Kerja sama Kelitbangan	0	0	-	0	0	1 kerjasama	200,000	1 kerjasama	200,000	1 kerjasama	200,000	1 kerjasama	200,000	1 kerjasama	200,000	Bapedalitbang	Pessel
			03.	8 Pengembangan inovasi pada generasi muda	Terciptanya inovasi pada generasi muda	0	0	-	3 Inovasi	92,976.60	3 inovasi	100,000	3 inovasi	100,000	3 inovasi	100,000	3 inovasi	100,000	0		Bapedalitbang	Pessel
			04.	9 Forum inovasi daerah		-	-	-	100	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
			28.	Prog Penelitian & Pembangunan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah		-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	-	-	Bapedalitbang	Pessel
			09.	1 Pengkajian pemanfaatan dana desa	Tersusunnya dokumen kajian pemanfaatan dana desa	-	-	-	-	-	100	60,000	100	60,000	100	60,000	100	60,000	-	-	Bapedalitbang	Pessel
			12.	2 Penataan kawasan pariwisata Berbasis Daur Ulang	Terwujudnya Penataan kawasan wisata berbasis daur ulang	-	-	-	-	-	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	-	-	Bapedalitbang	Pessel
			04.	3 kajian strategis pembukaan jalan kambang Muaro - labuah		-	-	-	-	-	100	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bapedalitbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Bapedalitbang selama lima tahun. Indikator kinerja tersebut yang digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bapedalitbang sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pengukuran keberhasilan Rencana Strategis Bapedalitbang yang mengacu kepada RPJMD 2016 – 2021 dimana Bapedalitbang dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama mengemban misi I, yaitu melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja utama daerah yang harus dicapai Bapedalitbang sesuai table.7.1 dan Indikator Kinerja yang mengacu kepada RPJMD dapat dijelaskan pada table 7.2 di bawah ini.

Tabel.7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat								
No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Peringkat Penilaian Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	C	CC	B	BB	BB	A	A

Tabel.7.2**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
I.	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	-	-	-	-
2	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	1 dok	-	1 dok	-	-	-
3	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	1 dok	-	-	-
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	98%	99%	99%	146%	-	-	-
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	98%	99%	99%	146%	-	-	-
7	Kesesuaian Rencana pembangunan dengan RTRW	80.41%	82.46%	84.51%	86.56%	88.61%	90.66%	92.71%

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

II.	Penelitian dan Pengembangan							
1.	Persentase implementasi rencana keliembangan	-	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase pemanfaatan hasil keliembangan	-	-	-	4,44	4,44	4,44	4,44
	Penerapan Sida							
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-	4,44	33,33	66,67	100	100
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	-	2	2	2	2	2

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Pada Tabel 7.1 dapat dijelaskan, bahwa indikator kinerja utama daerah yang diemban oleh Bapedalitbang adalah peningkatan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada tahun 2017 memenuhi target capaian, Terkait inikator kinerja Bapedalitbang yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD yang dijelaskan pada tabel 7.2 menggambarkan .kinerja yang akan dicapai Bapedalitbang selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Revisi Rencana Strategi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang terus berkembang, seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Revisi Rencana Strategis Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, diharapkan lebih mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun dan adanya keselarasan dengan RPJMD dan RPJP serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

Untuk mencapai visi dan misi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka seluruh aparatur Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi.
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah kedepan.

5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Akhirnya, semoga revisi perencanaan strategis yang disusun Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bapedalitbang secara proporsional.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapedalitbang

Arah Kajian	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diman Kewenangan PD)	
Manajemen sumber Daya Aparatur	Masih rendahnya kualitas SDM perencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan belum sesuai dengan kompetensi - Tingkat pendidikan - belum tersedianya fungsional perencana dan fungsional peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> - kompetensi perencana PD masih 	Rendahnya penguasaan pelaksana kegiatan
Manajemen Data	Rendahnya kualitas data perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM pengolah data masih rendah - belum optimalnya SI Penggunaan data 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kevalidan data masih - Penyampaian laporan PD tidak tepat wakt 	Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan
Perencanaan Berkualitas	Belum terwujudnya Perencanaan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM perencana masih rendah - belum optimalnya SI Penggunaan data - belum optimalnya peran kelitbangan dalam dokumen perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kevalidan data masih rendah - masih kurangnya keterlibatan PD dalam penyusunan dokumen perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingktkan - Rendahnya akurasi keputusan pembangunan
Keselarasan Perencanaan	Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan	belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi internal	belum optimalnya PD dalam mengacu dokumen perencanaan yang ada	Perencanaan masih kurang tepat sasaran

Tabel 3.2.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program
Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan	Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Belum optimalnya Koordinasi dan konsolidasi internal bapedalitbang	Kapasitas SDM Perencana yang belum merata antar bidang	meningkatkan kompetensi melalui bintek perencanaan
		Rendahnya kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan	Koordinasi antar perangkat daerah yang perlu ditingkat	Adanya regulasi pendukung terhadap proses penyusunan dan penerpan dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan	Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Peluang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah proses penyediaan data dan informasi pembangunan

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	
1	Meningkatnya Keselarasan Rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L/D	Belum optimalnya kapasitas, kuantitas SDM Perencana	Kur kap
		Belum Optimalnya Koordinasi Internal Antar Bidang	Tin, Beğ
		Belum Optimalnya Pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan	1. 2.
		Masih lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan	1. 2. 3.
		Belum Optimalnya Koordinasi	1. 2.

2	Rancangan Perpres RKF 2017	-	
3	Terwujudnya rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindak lanjuti K/L	1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Ma per
		2. Belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, dan evaluasi	1.
			2.
4	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/ sub bidang	Tin, pril
		Belum dipedomaninya standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi	Ma ber Op per

Sebagai Faktor	
Penghambat	Pendorong
Kurangnya motivasi aparatur untuk meningkatkan kapasitas	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana pusat dan daerah menjadi target nasional
Tinggi Intensitas koordinasi eksternal yang dilakukan Bapedalitbang	Terdapatnya keinginan untuk melakukan koordinasi
Belum adanya kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan mengenai data yang akan dipakai dalam proses perencanaan.	Kebutuhan data yang sangat tinggi dan pemangku kepentingan
Manajemen data dan informasi serta pengarsipkan dokumen perencanaan yang masih lemah.	
Tingginya volume kerja pada Bapedalitbang	Tersedianya berbagai peluang bintek dan pelatihan bagi aparatur
Masih terdapatnya aparatur yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi perencanaan	
Penempatan aparatur tidak sesuai dengan kompetensi	
Kurangnya pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi
Masih terdapatnya ego sektoral	

-	-
Isi rendahnya pemahaman aparatur mengenai pentingnya monev dan pengendalian	1. Tersedianya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan monev pada K/L
	2. Tersedianya dana yang cukup monev
System pengendalian monitoring dan evaluasi belum komperatif	Tersedianya dana untuk penyeliaan sistem penganggaran dan sistem pengendalian monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
Masih terbatasnya SDM yang memahami sistem yang terintegrasi	
gkat pemaahaman aparaur mengenai tukpoksi badi dan kelembagaan .	Terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah
Isi adanya pola pikir aparatur yang anggaapan bahwa penyusunan standar erasional Prosedur (SOP) hanya sebagai menuhan kewajiban administrasi saja	SOP sebagai salah subjek pembinaan dan pengawasan dan aparatur pemeriksaan